

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dan merupakan komitmen sebuah bangsa untuk mengejar ketertinggalan dalam berbagai sektor. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. Tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesenjangan pendapatan antarpenduduk dan antarsektor yang semakin kecil (Maria Christina YuliPratiwi 2018).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Proses tersebut mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. (kuncoro,2004:127).

Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem dalam kelembagaan. Pembangunan ekonomi

harus di pandang sebagai suatu proses yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar faktor faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi untuk dapat dilihat dan di analisis baik secara nasional maupun regional.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan mendapatkan investasi baru dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. (Sukirno, 2010:433).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain faktor pemerataan distribusi pendapatan dan jumlah penduduk adalah faktor inflasi. Banyak kajian membahas inflasi tidak hanya cakupan nasional, tetapi regional maupun internasional. Inflasi cenderung terjadi pada Negara-negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia dengan struktur perekonomian bercorak garis. Kegagalan atau guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga dipasar domestik dan berakhir dengan inflasi pada perekonomian.

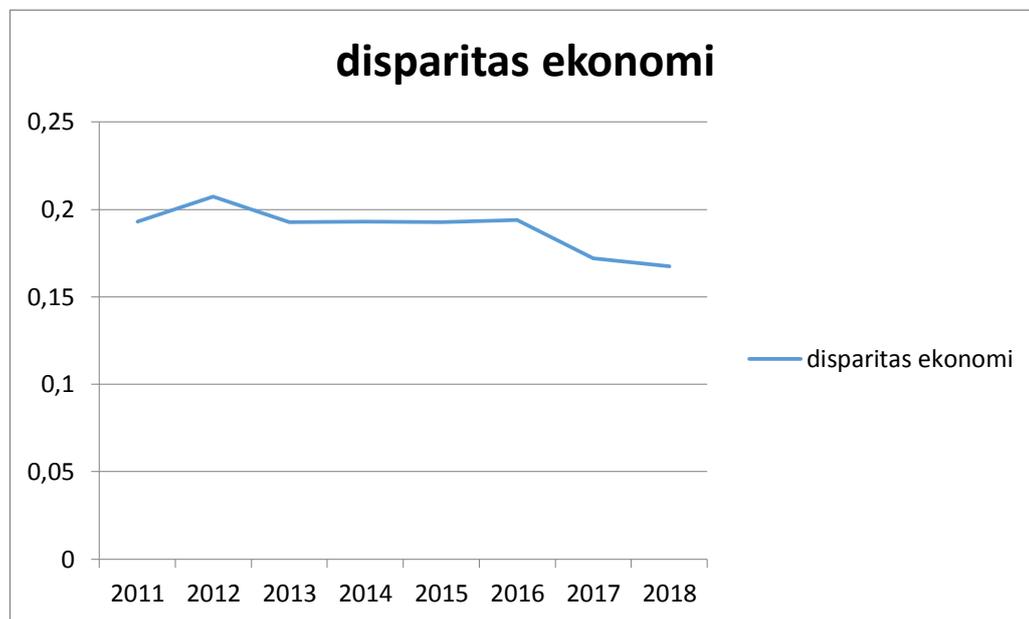
Secara umum pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP perkapita (Gros National Product) atau pendapatan

masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting yaitu: suatu proses yang berarti terjadinya perubahan terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat, dan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang terjadi pada jangka panjang. Pemerintah daerah memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan perekonomian daerah. Daerah-daerah semakin memiliki kebebasan untuk mengembangkan wilayahnya sesuai kebutuhan masyarakat local (Nehen,2010). Namun tidak semua daerah mengalami proses pembangunan ekonomi yang berjalan sama. Beberapa daerah mencapai pembangunan yang cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pembangunan yang lambat.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian yang tidak bias di abaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas baik terhadap perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Bagi perekonomian inflasi yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya ketidak stabilan ekonomi, menurunkan investasi, menghambat ekspor dan maupun dapat berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran. Dari sisi kesejahteraan, inflasi yang tinggi menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat, terutama bagi pekerja-pekerja yang mempunyai penghasilan tetap, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatkan kemiskinan.

Gambar 1

Disparitas ekonomi menurut perhitungan gini rasio Sumatera Barat tahun 2011-2018

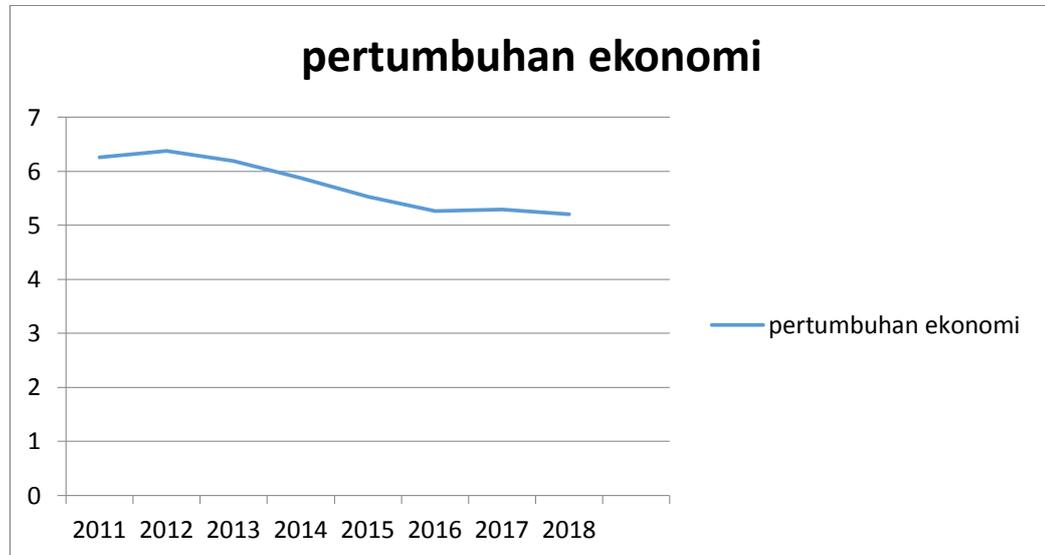


Sumber : Badan Pusat Statistik (dari berbagai sumber)

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Sumatera Barat, yang di analisis melalui perhitungan rasio gini, tercatat semakin timpang pada 2012 dan. Rasio gini yang mewakili tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Sumatera Barat tercatat sebesar 0,2075. pada tahunm 2018, turun sebesar 0,16759. Kepala Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Sukardi menjelaskan bahwa rasio gini yang dihitung dari besaran pengeluaran setiap rumah tangga digunakan untuk melihat jurang ketimpangan ekonomi penduduk.

Gambar 2

laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dari tahun 2011-2018:

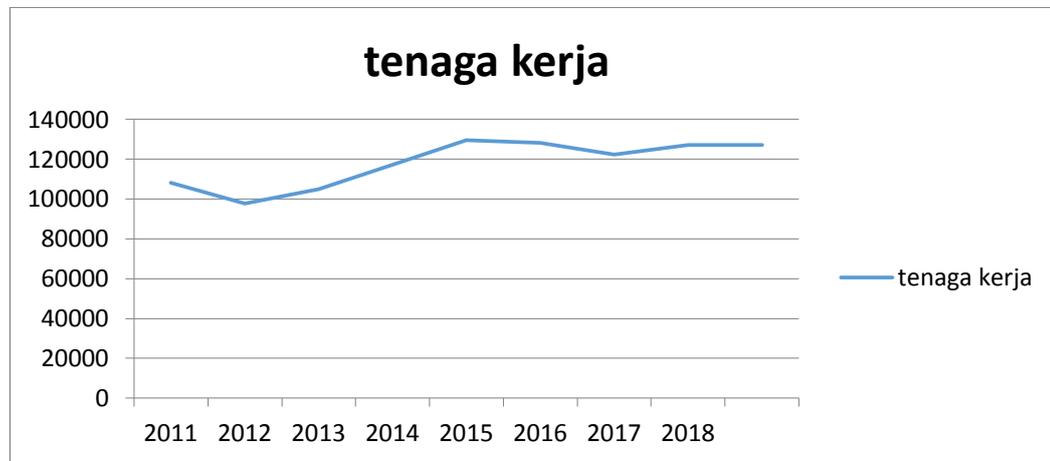


Sumber : Badan Pusat Statistik (dari berbagai sumber)

Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2018 cenderung berfluktuatif dapat dilihat pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,26 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 6,38. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2013 sebesar 6,19 hingga tahun 2018 sebesar 5,21

Meskipun provinsi Sumatera Barat memiliki persentase pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan masyarakat, guna membantu meningkatkan pertumbuhan daerah. Umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi.

Gambar 3
Tenaga Kerja di Sumatera Barat Tahun 2011-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (dari berbagai sumber)

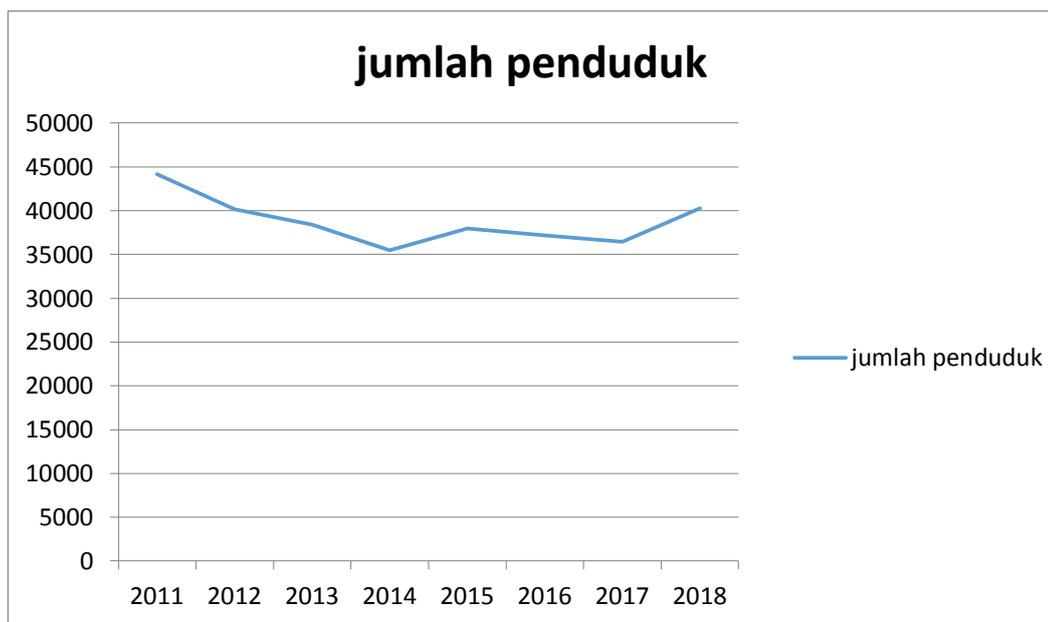
Berdasarkan data dari tabel di atas jumlah tenaga kerja di provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu delapan tahun terakhir jumlah tenaga kerja tertinggi pada tahun 2014 sebesar 129.498 jiwa, sedangkan jumlah tenaga terendah pada tahun 2011 sebesar 97.816 jiwa.

Kondisi kerja dalam revolusi industri dapat dikatakan sangatlah payah. Berubahnya sector perekonomian secara besar-besaran menyebabkan para pekerja dengan mata pencarian lain, terutama petani, kehilangan arah. Namun pabrik-pabrik yang baru dibangun tentunya membutuhkan buruh. Melihat masyarakat begitu membutuhkan pekerjaan dan kebersediaan mereka atas upah yang rendah, pemilik-pemilik pabrik memanfaatkan keadaan untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya memperkerjakan buruh dari pria, wanita bahkan anak-anak dalam kisaran 14-16 jam perhari nya, selama enam hari dalam satu minggu. Keadaan genting ini mendorong dibentuknya Labor Unions, atau Serikat pekerja,

yang sayangnya tidak memberi perubahan besar dalam tindakan protesnya karena imigran dari Negara-negara miskin tetap bersedia bekerja dengan upah yang sangat rendah.

Gambar 4

Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin tahun 2010-2018 di Sumatera Barat



Sumber : Badan Pusat Statistik (dari berbagai sumber)

Berdasarkan data dari tabel di atas jumlah penduduk di provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu enam tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan, dimulai pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk 44180 jiwa dan kemudian pada tahun 2017 jumlah penduduk menurun dengan 36451 jiwa, dan kembali naik pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk 40272. Jumlah penduduk yang semakin berkembang harus dapat ditekan karena akan mempengaruhi kegiatan perekonomian yang ada apabila jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Barat.
2. Mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Barat.
3. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Barar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa dalam menanggapi masalah-masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah.
2. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan sebagai acuan bagi kebijakan publik yang akan dibuat oleh pemerintah agar pemerintah memperhatikan segala hal dalam membuat kebijakan.
3. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya untuk dijadikan referensi yang meneliti masalah yang sama dengan variabel berbeda.